

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan menurut Supriyono (2018:63) merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). Prinsipal dapat mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Teori keagenan berasumsi bahwa setiap individu mempunyai motivasi untuk mengutamakan kepentingannya sendiri sehingga dengan asumsi yang dimiliki oleh teori agensi akan menimbulkan sebuah konflik antara *principal* dan *agent*, dalam penelitian ini masyarakat sebagai *principal*, sedangkan pemerintah daerah sebagai *agent*.

Kaitan antara teori keagenan (*Agency Theory*) dengan penelitian ini adalah dengan adanya hubungan antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah (*agent*) dimana pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna memberikan informasi keuangan pemerintah kepada masyarakat (*principal*). Masyarakat sebagai prinsipal berkepentingan untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas sehingga memudahkan di dalam pengambilan keputusan. Adanya komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah dan peran auditor internal yang mumpuni merupakan faktor yang penting bagi pemerintah (*agent*) dalam memperoleh pelaporan keuangan yang berkualitas guna terpenuhinya keperluan masyarakat (*principal*) di dalam mengambil keputusan.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa "laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Menurut Kasmir (2019:7) “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan entitas pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Selain itu menurut Suteja (2018) ”laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dan hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan”.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.71 tahun 2010). Menurut Tanjung (2014:11) dalam Oktavia dan Rahayu (2019) “setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan manajemen, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan pada periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat dari karakteristik kualitatif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta dapat menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki:

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan dan mengoreksi apa yang terjadi di masa yang lalu.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi untuk membantu pengguna dalam memprediksi masa yang akan datang, dilihat dari yang terjadi di masa lalu dan masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*)
Informasi disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh serta berguna untuk pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap transaksi dengan jujur, dan dapat diverifikasi. Adapun informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur (*representational faithfulness*)
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, walaupun dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, namun hasilnya tidak jauh berbeda.
- c. Netralitas (*neutrality*)
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dengan memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

2.1.3 Komitmen Organisasi

2.1.3.1 Pengertian Komitmen Organisasi

Menurut Samsuddin (2018:61) “komitmen organisasi adalah janji (perjanjian/kontrak) untuk melakukan sesuatu. Janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang”. Selain itu menurut Priansa (2018:234) “komitmen organisasi merupakan identifikasi pegawai terhadap persetujuan untuk mencapai misi unit atau misi organisasi”.

Menurut Tampubolon dan Basid (2019) “komitmen organisasi berkaitan pada seberapa terlibat orang dan organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen organisasi yaitu ukuran derajat kepercayaan dan keinginan karyawan dalam menyetujui tujuan lembaga dan kesetiaan untuk tinggal di dalamnya”. Sedangkan menurut Badu et al., (2019) “komitmen organisasional adalah derajat seseorang mengikatkan dirinya sebagai bagian dari suatu organisasi dan berkeinginan untuk berpartisipasi aktif di dalam organisasi tersebut”. Tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi menentukan seberapa baik tujuan organisasi akan tercapai. Semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin besar kemungkinan karyawan akan bertahan dalam organisasi dan meningkatkan kinerjanya. Kinerja karyawan yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan ukuran kepercayaan dan keinginan karyawan dalam mengikatkan dirinya sebagai bagian dari suatu organisasi untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1.3.2 Dimensi Komitmen Organisasi

Busro (2018:78) mengemukakan bahwa terdapat tiga dimensi komitmen organisasional yaitu:

1. Komitmen Afektif (*Affective commitment*), yakni berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi atau keterikatan emosional karyawan. Identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional atau merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi.
2. Komitmen Kontinu (*Continuance commitment*), yakni suatu kesadaran akan biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau ditanggung (kerugian baik finansial maupun kerugian lain) berhubungan dengan keluarnya pegawai dari organisasi.
3. Komitmen Normatif (*Normative commitment*), yakni suatu perasaan wajib dari pegawai untuk tetap tinggal dalam suatu organisasi karena adanya perasaan utang budi pada organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa dimensi komitmen organisasi terdiri dari komitmen afektif dimana pegawai berkeinginan untuk terikat pada organisasinya, komitmen kontinu dimana pegawai ingin tetap tinggal karena kebutuhan finansial, dan komitmen normatif dimana pegawai merasa wajib untuk tetap tinggal karena perasaan utang budi pada organisasi tempatnya bekerja.

2.1.4 Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami atau memahamkan. Orang yang memiliki pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang sistem akuntansi pemerintah daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan status keuangan dan operasional keuangan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Menurut Sella et al., (2020) "Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Menurut Karima et al., (2021) “Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah alat yang digunakan untuk mengimplementasikan prinsip akuntansi yang ditentukan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mendemonstrasikan serangkaian proses akuntansi, termasuk proses mengidentifikasi transaksi keuangan, menyimpan di jurnal, memposting ke buku besar, mengedit neraca, menyiapkan dokumen kerja konsolidasi, dan akhirnya menyiapkan laporan keuangan”. Adanya pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah daerah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu:

1. Basis Kas
SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterimanya kas oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Daerah. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.
2. Sistem Pembukuan Berpasangan (*Double Entry System*)
Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu: $Aset = Utang + Ekuitas$. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit dengan perkiraan yang lain.

Dalam Pemandagri Nomor 77 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) meliputi dua subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)
Sistem Akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, koreksi dan penyusunan laporan keuangan SKPD.
2. Sistem Akuntansi SKPKD (SA-SKPKD)
Sistem Akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian

dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan keuangan dari beberapa transaksi-transaksi suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi atau acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah daerah.

2.1.5 Peran Auditor Internal

2.1.5.1 Pengertian Peran Auditor Internal

Menurut Hery (2017:238) “audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”.

Sedangkan menurut Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (2014:3) “audit internal adalah kegiatan independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik)”.

Peran internal audit atau inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah melaksanakan fungsi kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran perbaikannya (AAIPI, 2014).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa peran auditor internal adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atau informasi untuk menilai suatu organisasi serta menjamin pencapaian tujuan dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kepada pihak yang bersangkutan.

2.1.5.2 Tahapan Pelaksanaan Auditor Internal

Menurut Tugiman (2014:53) tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Audit
Audit internal harus merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan harus didokumentasikan dan harus meliputi:
 - a. Perolehan informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
 - b. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
2. Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
 - a. Pada tahap ini audit internal harus mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi sebagai berikut:
 - b. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.
 - c. Dilakukannya pengawasan terhadap proses pengumpulan, pengalisan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
3. Tahap Penyampaian Hasil Pemeriksaan
Audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:
 - a. Suatu laporan harus objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
 - b. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.
4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Audit internal terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit internal harus memastikan apakah suatu tindakan kolektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, atautkah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan auditor internal meliputi tahap perencanaan, tahap pengujian dan

pengevaluasian informasi, tahap penyampaian hasil pemeriksaan dan tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rivaldy Manimpurung, Lintje Kalangi, dan Natalia Gerungsi (2018)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado	X ₁ : Kapasitas Sumber Daya Manusia X ₂ : Komitmen Organisasi Y : Kualitas Laporan Keuangan	Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2	Frasca Ardy Nugroho dan Widhy	Pengaruh Komitmen Organisasional,	X ₁ : Komitmen Organisasional X ₂ : Sistem	Komitmen organisasional berpengaruh positif

	Setyowati (2019)	Sistem Informasi Akuntansi, dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Informasi Akuntansi X_3 : Peran Audit Internal Y : Kualitas Laporan Keuangan	signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Peran audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
3	Fitri Mariana Tampubolon dan Ahmad Basid (2019)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X_1 : Komitmen Organisasi X_2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X_3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Y : Kualitas Laporan Keuangan	Komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

4	Shitami Oktavia dan Sri Rahayu (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	X ₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₂ : Komitmen Organisasi X ₃ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
5	Rian Rezky Pratama dan M. Rizal Yahya (2019)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh	X ₁ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₂ : Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₃ : Komitmen Organisasi Y : Kualitas Laporan Keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

6	Ansir Launtu (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Gowa	X_1 : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah X_2 : Kualitas Sumber Daya Manusia Y : Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
7	Esha Selvia Ayu Sella, Maslichah, dan Dwiyani Sudaryanti (2020)	Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas	X_1 : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah X_2 : Pemahaman Akuntansi X_3 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan X_4 : Pengendalian Akuntansi Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh

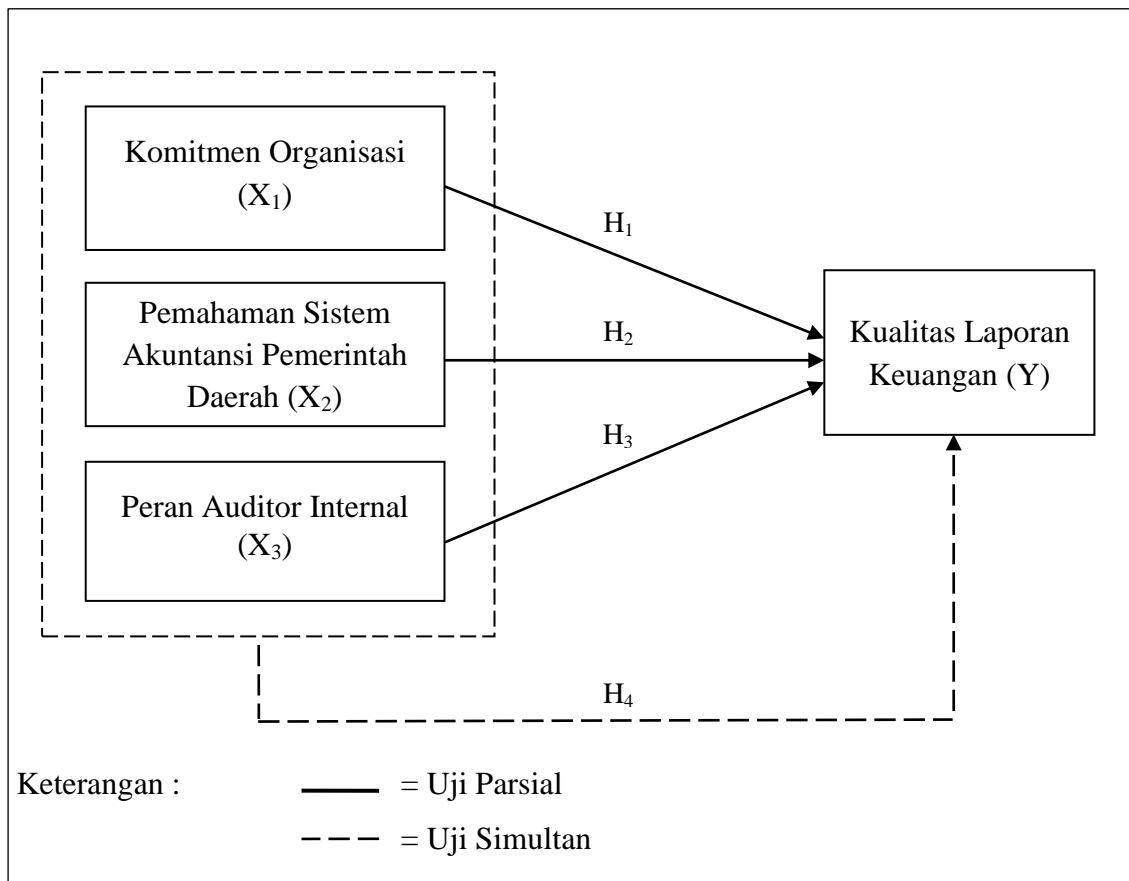
		Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuran)		signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
8	Dina Karima, Maslichah, dan Dwiyani Sudaryanti (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumpang)	X_1 : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah X_2 : Pemahaman Akuntansi X_3 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

9	Cut Fitrika Syawalina dan Tina Rosmeiwati (2019)	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Audit Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Distrik Navigasi Kota Sabang	X ₁ : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah X ₂ : Peran Audit Internal X ₃ : Kompetensi Sumber Daya Y : Kualitas Pelaporan Keuangan	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Peran Audit Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kompetensi Sumber Daya berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
10	Yulens Frits Bonai, Syaikhul Falah, dan Sylvia Christina Daat (2019)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X ₁ : Kapasitas Sumber Daya Manusia X ₂ : Peran Auditor Internal Y : Kualitas Laporan Keuangan	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.



Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peran Auditor Internal secara parsial maupun simultan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019:99).

2.4.1 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Komitmen organisasi berkaitan pada seberapa terlibat orang dan organisasi tempat mereka bekerja. komitmen organisasi yaitu ukuran derajat kepercayaan dan keinginan karyawan dalam menyetujui tujuan lembaga dan kesetiaan untuk tinggal di dalamnya (Tampubolon dan Basid, 2019). Pegawai yang berkomitmen dalam organisasi sangat dibutuhkan dalam lingkungan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyajian informasi yang baik dan memberikan informasi yang lebih akurat, terutama dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya komitmen terhadap organisasi, maka setiap pegawai akan memiliki rasa tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan tugas organisasi, serta termotivasi untuk melaporkan semua kegiatan termasuk dalam penyusunan laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Manimpurung et al., (2018) bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 : Komitmen Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah (PP No.12 Tahun 2019). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diterapkan berdasarkan standar akuntansi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan keuangan. Pada prinsipnya,

sistem akuntansi pemerintah daerah disusun agar para petugas menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan sistem akuntansi dengan baik dan benar. Adanya pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik sesuai yang telah ditentukan serta laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Launtu (2021) menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2 : Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.3 Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Auditor internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut. Menurut Handayani et al., (2020) peran auditor internal dapat memberikan kontribusi yang lebih mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena peran auditor internal merupakan elemen dari pengendalian internal pemerintah dan sangat berkaitan erat dengan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh aparatur pemerintahan. Jika pengendalian intern akuntansi dirancang dan diterapkan dengan baik oleh manajemen di dalam pengelolaan organisasinya, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalannya. Kualitas yang dihasilkan oleh auditor internal terhadap instansi yang diaudit berupa adanya ketepatan waktu dan keakuratan dalam mengevaluasi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Peran Auditor Internal dapat memberikan jaminan dan membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas handal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Sasmita et al., (2020) bahwa peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3 : Peran Auditor Internal berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.4 Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pegawai yang berkomitmen dalam organisasi sangat dibutuhkan dalam lingkungan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyajian informasi yang baik dan memberikan informasi yang lebih akurat, terutama dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya komitmen setiap individu terhadap organisasi, maka setiap pegawai akan memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk menjalankan tugas organisasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas. Adanya sumber daya yang memahami sistem akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Audit internal di pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat daerah memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai pengawas intern. Peran auditor internal dapat memberikan jaminan dan membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4 : Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peran Auditor Internal berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.